

STUDI KRITIS PERANAN WANITA DALAM PERPOLITIKAN DUNIA

Oleh: Ita Mutiara Dewi

Abstrak

Keterlibatan wanita dalam panggung politik sebenarnya bukanlah hal yang asing di dunia sejak zaman dahulu. Peranan langsung maupun tidak langsung para wanita memiliki pengaruh tersendiri. Bahkan dalam mitosnya suku Amazon di belantara Amerika terkenal dengan komponen masyarakatnya dari kepala suku, panglima dan pasukan perang sampai penduduk biasa yang semuanya terdiri dari wanita. Selama ini dalam kaca mata gender dan feminisme, muncul anggapan bahwa keterlibatan wanita sebagai pemimpin negara secara langsung maupun kedudukan strategis lain secara langsung dalam pengambilan kebijakan pemerintahan berbanding lurus dengan terselesaikannya permasalahan wanita. Benarkah kenyataan berkata demikian? Bagaimana menempatkan peranan wanita dalam dunia politik sesuai dengan fitrahnya? Analisis dalam tulisan ini diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut

Keywords: Politik, Gender dan Feminisme, Islam

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat di zaman Mesir Kuno, telah ada pemimpin wanita pada tahun 31 SM bernama Meryet Nit. Pada tahun 2 SM, muncul Cleopatra sebagai pemimpin Mesir yang terkenal dengan berbagai pesona dan kharismanya dalam menaklukkan pria pemimpin dunia yang terkenal dimasanya yaitu: Marcus Antonius dan Julius Caesar. St. Joan of Arch yang menjadi wanita pertama sebagai panglima perang dalam *Hundred Year's Wars*. Wu Chao di China serta Catherine the Great yang berprestasi terlama dalam berkuasa penuh terhadap Rusia dan Eropa. Adapun beberapa pemimpin wanita yang dianggap paling berpengaruh di dunia yaitu:

Rank	Name	Country	Years
#16	Queen Elizabeth I	England	1533 – 1603
#21	Queen Isabella	Spain	1451 – 1504
#36	Golda Meir	Israel	1898 – 1978
#38	Queen Victoria	England	1819 – 1901
#46	Catherine the Great	Russia	1729 – 1796
#56	Indira Gandhi	India	1917 – 1984
#68	Margaret Thatcher	England	1926 – present
#84	Cleopatra	Egypt	69 BC – 30 BC
#89	Wu Chao	China	625 – 705

Sumber: Journal of International Women's Studies Vol. 7 #2 November 2005

Pandangan Gender dan Feminisme terhadap Politik Perempuan

Menurut *Women's Studies Encyclopedia*, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Identitas gender menurut *The New Encyclopedia Britannica* adalah *not fixed at birth; physiological and social factor contribute to the early establishment of a core identity, which is modified and expended by social factors as the child matures*. Jadi, gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor biologis yang secara permanen berbeda antara laki-laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan perilaku, hasil konstruksi sosial melalui proses panjang yang bersifat tidak permanen.¹ Misalnya: perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, dsb. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut bukanlah kodrat, karena tidak abadi dan dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan dan sebaliknya perempuan ada yang kuat, rasional, perkasa. Maka, gender dapat berubah menurut waktu dan tempat.²

Menurut Wikipedia, feminisme merupakan kumpulan teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral yang memotivasi maupun terfokus dalam pembebasan wanita. Dalam istilah sederhana, feminisme merupakan kepercayaan kesetaraan sosial, politik, ekonomi pria dan wanita dan gerakan yang diorganisir berdasarkan pendirian bahwa faktor biologi jenis kelamin seharusnya tidak menjadi faktor pre-determinan yang membentuk identitas sosial seseorang atau hak sosial-politik maupun ekonomi.³

¹ Aunur Rofiq. *Menimbang Nasib Perempuan dalam Agama dan Feminisme* dalam Jurnal el-Harakah No.56 / XXII/ Januari –Maret 2001, hlm. 68 - 69

² Mansour Fakih. *Manual Pendidikan Politik bagi Perempuan*. t.t. t.p.

³ diakses dari <http://www.wikipedia.org>. pada 15 April 2007

Feminisme telah dianggap sebagai ide revolusioner yang dipandang pernah ada di dunia Barat, yang akhirnya menyebar pula ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia dan memasuki segala lini kehidupan. Dari masalah olahraga, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan sebagainya, yang ada di dunia ini feminisme memunculkan berbagai ragam teori dan aliran seperti feminis liberal, radikal, marxis, sosialis, ekofeminis bahkan feminis islam.

Feminisme sebagai sebuah ide dan gerakan yang berusaha untuk memperoleh pengakuan persamaan kedudukan, derajat, hak dan kewajiban, ini tidak muncul tanpa sebab. Di dunia Barat (Eropa dan AS) maupun dalam pandangan agama tertentu, kedudukan wanita sebelum ide ini muncul, sungguh memprihatinkan. Sebagai ide yang revolusioner, feminisme berusaha membebaskan perempuan dan laki-laki dari ketertindasan. Perempuan dianggap tertindas karena nasibnya, laki-laki dianggap tertindas karena pemikirannya yang tidak tercerahkan.

Pada intinya feminisme melihat dunia yang ada sejak dulu hingga kini bersikap tidak adil terhadap wanita akibat adanya perbedaan gender (*gender differences*) yang melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: (1) marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi; (2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik.⁴

Dalam analisis gender dan feminisme, banyaknya pemimpin wanita di dunia pada awalnya diharapkan mewujudkan adanya dunia yang lebih berpihak kepada wanita. Selama ini, baik gender dan feminisme berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tertindas dan terpinggirkan. Oleh karena itu dengan jumlah populasi wanita di

⁴ Fakhri, op. cit.

dunia yang semakin meningkat diperlukan keterlibatan wanita yang lebih banyak di bidang politik⁵ dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Hal ini dapat terjadi karena pengalaman masa lampau di negara-negara Eropa, yang pernah dipimpin oleh wanita, tetapi posisi wanita cukup terbelakang dan tidak dapat berkontribusi banyak dalam bidang politik dan pemerintahan. Misalnya, hukum Inggris pada abad pertengahan menetapkan bahwa dalam ikatan perkawinan, seorang wanita akan kehilangan hak-hak yang dimiliki saat masih bujangan. Seluruh harta kekayaannya berpindah kepada suaminya, sehingga diri dan kekayaannya berada dalam kekuasaan penuh suaminya. Sang istri tidak dapat mengeluarkan harta miliknya atau membuat perjanjian bisnis atas nama dirinya dan juga tidak dapat menuntut maupun dituntut. Secara praktis, pernikahan sama artinya dengan saat kematian hak-hak sipil wanita.

Pada tahun 1856, wanita-wanita Inggris menyampaikan petisi kepada anggota parlemen yang seluruhnya adalah pria. Petisi tersebut berisi tuntutan agar kaum wanita diperbolehkan menyimpan penghasilannya sendiri dan hak mewarisi harta. Tahun 1857, wanita yang bercerai mendapatkan hak sebagaimana wanita yang membujang, sedangkan yang menikah harus menunggu sampai tahun 1893.⁶

Sedangkan di Perancis, saat terjadi revolusi 1785 muncul karya yang menegaskan bahwa wanita memiliki hak-hak alami sebagaimana dimiliki pria. Selama abad ke-20, John Stuart Mill dan beberapa teoritis liberal, mendorong tumbuhnya gerakan perluasan hak-hak wanita di Eropa, Amerika dan bagian kerajaan Inggris lain.

⁵ Makna politik disini adalah: (1) usaha mencari, memperluas dan mempertahankan kekuasaan (*power*); (2) tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, lebih mengarah pada kebijakan (*policy*), dikutip dari Soelistiyati Ismail Ghani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 17

⁶ Ismail Adam Patel, *Perempuan, Feminisme dan Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, September 2005, hlm. 12

Hasilnya, terjadi perluasan hak sipil wanita secara terus-menerus, termasuk hak kepemilikan (*property*) di dalam perkawinan, pendidikan dan profesi yang lebih tinggi. Setelah serangkaian kampanye yang dilakukan kelompok *Suffragate* di Inggris, hak-hak perempuan diperluas ke hak-hak politik, terutama setelah Perang Dunia Pertama.⁷

Sedangkan di Amerika, feminisme mulai tumbuh di tahun 1840-an dengan adanya gerakan yang dipimpin Elizabeth Cady Stanton dan Susan B. Anthony. Setelah *American Civil War*, kedua orang tersebut mendirikan *National Woman Suffrage Association* (NSWA). Lucy Stone mendirikan *American Woman's Suffrage Association* (AWSA). Pada tahun 1890, NSWA dan AWSA digabung menjadi *National American Woman's Suffrage Association* (NAWSA). Pada tahun 1920 berdasarkan *19th Amendment*, wanita Amerika mendapatkan hak suara dalam pemilihan presiden.⁸

Gerakan wanita berperspektif gender dan feminisme ini bertujuan agar nasib wanita menjadi sejajar dan setara dalam segala bidang dengan pria. Perjuangan wanita tersebut selalu diarahkan pada posisi wanita sebagai aktor utama maupun figuran di depan layar panggung politik berupa: (1) posisi wanita sebagai pemimpin negara seperti presiden, perdana menteri atau ratu serta pengambil kebijakan strategis lain; (2) akses politik wanita dan pria dalam parlemen dengan perbandingan 50:50. Hal ini sudah berlaku khususnya di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia.

Pandangan Islam terhadap Politik Perempuan

Islam bukan sekedar agama ritual, melainkan *diin*, mencakup dimensi spiritual dan politik atau dengan kata lain merupakan suatu ideologi. Selaras dengan hal tersebut, Dr. V. Fitzgerald mengungkapkan bahwa Islam bukanlah semata agama (*a religion*),

⁷ Ian Adams, Ab. Ali Noerzaman, *Ideologi Politik Mutakhir*, Yogyakarta: Qalam, Juli 2004, hlm 381-383

⁸ Bahan Training Solidaritas Perempuan Indonesia

namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran islam dibangun atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁹

Aturan islam dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) hubungan manusia dengan Tuhannya yang diatur dalam hal *ibadah mahdah*, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya; (2) hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang diatur dalam hal *adab*, seperti makan, minum, berpakaian yang menutup aurat, akhlak yang mulia; (3) hubungan manusia dengan manusia yang lain yang diatur dalam hal *mu'amalah*, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Oleh karena itu pembahasan tentang politik merupakan cabang dari masalah *mu'amalah*.¹⁰

Islam memandang bahwa secara etimologi, politik yang dalam bahasa Arab disebut dengan kata *siyasa* yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang kamus al-Muhith mengatakan bahwa '*sustu ar-ra'iyata siyasatan*' berarti saya memerintahnya dan melarangnya. Secara terminologi, politik bermakna usaha untuk melakukan pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, yang mencakup aspek pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, sosial, pertahanan keamanan, hubungan internasional dan sebagainya.¹¹

Di dalam syari'at islam terdapat aturan-aturan yang berlaku umum pria dan wanita maupun khusus wanita. Berkaitan dengan masalah politik, tentunya juga ada yang aturan berlaku umum dan berlaku khusus. Hal-hal yang berlaku umum yaitu: (a)

⁹ Muhammedan Law, bab 1, hal. 1 dalam M. Dhiauddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, hal.

¹⁰ Disarikan dari Hafidz Abdurrahman, *Islam: Politik dan Spiritual*, Jakarta: Wadi Press, t.t. hlm 189 - 217

¹¹ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2004, hlm. 15

Hak dan kewajiban untuk memilih dan mengabsahkan seorang kepala negara dalam sistem pemerintahan islam; (b) Hak memilih dan dipilih sebagai anggota majelis umat¹²; (c) Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar (d) Kewajiban menasehati dan mengkoreksi penguasa; (e) Hak menjadi anggota partai politik.¹³

Tidak semua posisi aktor utama maupun figuran depan layar diperbolehkan bagi kaum wanita. Jadi ada aturan yang berlaku khusus bagi wanita dimana posisi-posisi strategis dalam struktur pemerintahan islam yang tidak dapat diduduki wanita yaitu *khalifah*¹⁴, *wali*¹⁵, *qadhi mahkamah mazhalim*¹⁶, panglima perang, dan sebagainya. Sedangkan dalam pemerintahan saat ini wanita tidak boleh menduduki posisi seperti presiden, perdana menteri, panglima angkatan bersenjata, kepada departemen atau menteri, gubernur.

Pembedaan aturan-aturan antara pria dan wanita bukan berarti bahwa islam itu merendahkan kaum wanita atau wanita menjadi warga kelas dua. Tetapi islam memandang bahwa posisi sebagai penguasa yang duduk di pemerintahan maupun rakyat itu sama-sama penting. Penguasa adalah pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah. Karena itu, keberhasilan pengaturan urusan umat demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat bergantung tidak hanya kepada pemimpinnya, tetapi juga kepada seluruh warga masyarakat tersebut.¹⁷ Dengan demikian, islam tidak memandang orang yang menjabat kepala negara lebih mulia derajatnya karena yang

¹² Sebutan tempat berkumpul dan bermusyawarahnya wakil-wakil masyarakat dalam sistem pemerintahan islam untuk menyelesaikan permasalahan dalam perspektif syari'at islam

¹³ hak dan kewajiban ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh para wanita di zaman Rasulullah maupun masa keemasan peradaban islam, dimuat dalam Najmah Sa'idah dan Khusnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003, hlm. 149 - 156

¹⁴ Sebutan pemimpin negara dengan sistem pemerintahan islam bernama khilafah yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan teokrasi, demokrasi, oligarki maupun monarki

¹⁵ Sebutan semacam gubernur

¹⁶ Sebutan untuk hakim yang mengkoreksi atau mengadili jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh khalifah

¹⁷ Saidah dan Khatimah, op.cit. hlm 157

menentukan kemuliaan itu adalah ketaatannya menjalankan aturan-aturan Allah. Seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya dengan baik dapat lebih mulia di mata sang Pencipta dibandingkan penguasa atau pemimpin negara yang dzalim.

Peranan Wanita dalam Politik: Antara Mitos dan Fakta

Opini umum sering mengatakan bahwa peranan wanita sebagai aktor utama pembuatan kebijakan politik secara langsung terutama sebagai presiden dan perdana menteri, berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang memihak dan menyejahterakan perempuan. Tetapi hal ini ternyata hanya merupakan mitos. Terbukti dengan banyaknya negara dengan pemimpin wanita, masih tetap terjadi kemiskinan, ketidaksejahteraan, ketidakadilan, kekerasan terhadap wanita khususnya sebagai warga negara dengan populasi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Sebagai contoh: di negara Asia Selatan dimana banyak ditemui pemimpin wanita, namun angka ketidaksejahteraan cukup tinggi. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), jumlah orang yang kurang gizi (malnutrisi) pada tahun 2000-2002 di India yaitu 250,4 juta jiwa, Bangladesh 42,5 juta jiwa, dan Pakistan 29,3 juta jiwa.

Di Inggris dan Amerika Serikat (AS) sebagai titik tolak gerakan feminisme, dan dapat dikenal nama-nama wanita yang memiliki peran signifikan seperti Ratu Elizabeth, Margareth Thatcher, Condoleeza Rice, justru angka-angka permasalahan sosial cukup tinggi, yaitu:

- a. Menurut *The National Violence Against Women Survey*, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 1995 – 1996 dialami oleh 25% wanita AS
- b. Pada tahun 1998, 76% wanita dilaporkan telah mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan oleh mantan atau pasangan kumpul kebo, suami ataupun pacarnya

- c. Pada tahun 2000, pembunuhan terhadap pasangan tercatat 33,5% bagi wanita dan kurang dari 4 % adalah pria
- d. Pada tahun 2001, sebanyak 41.740 wanita telah menjadi korban serangan seksual yang dilakukan oleh pasangannya
- e. Kasus aborsi dengan alasan non-medis pada tahun 1993 yaitu dilakukan oleh 819.000 wanita di Inggris dan Wales dan jumlahnya terus meningkat hingga sekarang
- f. Menurut *Alan Guttmacher Institute*, sebuah organisasi penelitian yang berafiliasi dengan *The Planned Parenthood*, sebuah lembaga penyedia aborsi terkemuka di AS, menyatakan bahwa jumlah total aborsi yang dilakukan kaum perempuan AS adalah 10 – 20 % lebih tinggi daripada angka statistik resmi.
- g. Gambaran lebih ringkas dari semua itu adalah dalam setiap jam di Inggris, rata-rata terdapat seorang perempuan diperkosa, 18 pasangan suami istri bercerai, 20 orang perempuan melakukan aborsi dan 24 orang bayi lahir dari perempuan yang tidak bersuami.¹⁸

Ditambah lagi fakta bahwa di negara-negara kesejahteraan (*welfare states*) Eropa seperti Jerman, Perancis, Norwegia, Denmark dan negara Skandinavia lain, angka penduduk yang mau menikah adalah terus menurun dari tahun ketahun. Sedangkan aborsi, perceraian, pergaulan bebas, pornografi merupakan hal-hal yang tidak terselesaikan dengan baik oleh pemerintah, termasuk yang sudah menerapkan persentase keterlibatan wanita dalam aktor politik utama langsung sebesar 50 : 50.

¹⁸ lebih lanjut dapat dibaca Elisabeth Diana Dewi, *Profil Keluarga di Barat* dalam Jurnal Al-Insan No.3, Vol. 2, 2006, hlm. 14 -16 dan Patel, op. cit. hlm. 19 - 38

Name	Country	Office	Years
Sirimavo Bandarnaike	Ceylon (Sri Lanka)	PM	1960-65, 70-77, 94-2000
Indira Gandhi	India	PM	1966-77, 80-84
Golda Meir	Israel	PM	1969-74
Isabel Peron	Argentina	President	1974-76
Elizabeth Domitien	Central African Rep	PM	1975-76
Marie de Lourdes Pintasilgo	Portugal	PM	1979-80
Lidia Gueiler	Bolivia	President	1979-80
Margaret Thatcher	Britain	PM	1979-90
Mary Eugenia Charles	Dominica	PM	1980-95
Vigdís Finnbogadóttir	Iceland	President	1980-96
Gro Brundtland	Norway	PM	1981,86-89, 90-96
Agatha Barbara	Malta	President	1982-86
Milka Planinc	Yugoslavia	President	1982-86
Maria Liberia Peres	Nicaragua	President	1984-85
Maarie Liveria-Peters	Nether. Antilles	PM	1984-86, 88-94
Corazon Aquino	Philippines	President	1986-92
Benazir Bhutto	Pakistan	PM	1988-90, 93-97
Violeta Chimirro	Nicaragua	President	1990-96
Ertha Pascal-Trouillot	Haiti	President	1990-91
Kazimiera Prunskiene	Lithuania	PM	1990-91
Mary Robinson	Iceland	President	1990-97
Edith Cresson	France	PM	1991-92
Begum Khaleda Zia	Bangladesh	PM	1991-96, 2001-present
Hanna Suchocka	Poland	PM	1992-93
Susanne Camelia-Romer	Nether. Antilles	PM	1993, 98-99
Kim Campbell	Canada	PM	1993
Sylvie Kinigi	Burundi	PM	1993-94
Marita Peterson	Faroe Islands	PM	1993-94
Agathe Uwilingiyimana	Rwanda	PM	1993-94
Tansu Ciller	Turkey	PM	1993-96
Chandrika Kumaratunga	Sri Lanka	President	1994-present
Claudette Werleigh	Haiti	PM	1995-96
Sheikh Hasina Wazed	Bangladesh	PM	1996-2001
Ruth Perry	Liberia	President	1996-present
Pamela Gordon	Bermuda	Premier	1997-98
Janet Jagan	Guyana	President	1997-99
Jenny Shipley	New Zealand	PM	1997-99
Mary McAleese	Ireland	President	1997-present
Ruth Dreifuss	Switzerland	President	1998-99
Jennifer Smith	Bermuda	Premier	1998-2003
Helen Clark	New Zealand	PM	1999-present
Mireya Moscoso	Panama	President	1999-2003
Vaira Vike-Freiberga	Latvia	President	1999-present
Tarja Halonen	Finland	President	2000-present
Gloria Macapagal-Arroyo	Philippines	President	2001-present
Megawati Sukarnoputri	Indonesia	President	2001-present
Maria Das Neves	Sao Tome	PM	2002-present
Beatriz Merino	Peru	PM	2003
Luisa Dias Diogo	Mozambique	PM	2004-present
Natasa Micic	Serbia	President	2002-2004
Nino Burjanadze	Georgia	President	2003
Barbara Prammer	Austria	President	2004

Sumber: Woman World Leader, Journal of International Women's Studies Vol. 7 #2 November 2005

Mengamati tabel diatas, dapat pula direfleksikan dari sekian banyak pengambil kebijakan strategis yaitu kaum wanita, ternyata masalah-masalah masyarakat yang

berkaitan dengan kehidupan manusia secara umum termasuk para wanita, juga tidak terselesaikan dengan baik.

Belajar dari sejarah kehidupan politik di masa lampau, dapat diamati bahwa ibu-ibu suri Kaisar Cina dan Korea ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar meskipun yang menjadi kepala negara dan pemerintahan adalah Sang Kaisar. Artinya meskipun peranan ibu suri di balik layar atau sutradara maupun *think-thank*, justru terkadang kebijakan ibu suri-lah yang lebih dipertimbangkan oleh Sang Kaisar. Bahkan dalam gambaran yang ditampilkan di film-film Asia Timur tersebut, ibu suri, permaisuri maupun selir berusaha mempengaruhi kebijakan politik Kaisar dalam mengatur urusan masyarakat. Begitu pula pernah didengar di zaman orde baru bahwa meskipun Tien Suharto sebagai Ibu Negara atau *first lady* waktu itu justru menjadi penasehat atau *think-thank* yang didengarkan oleh sang suami, Suharto, presiden Indonesia saat itu. Sebenarnya cukup banyak *first lady* lain yang mempengaruhi kebijakan suaminya. Oleh karena itu peranan tidak langsung di bidang politik atau sebagai sutradara di balik layar sangat memungkinkan mempengaruhi kebijakan politik suatu negara.

Menempatkan Fitrah Wanita dalam Koridor Politik yang Ideal

Belajar dari peranan wanita tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak selamanya seorang wanita yang ada di depan layar sebagai aktor utama pembuat kebijakan politik seperti presiden, anggota parlemen dengan persentase 50% dapat menyebabkan kehidupan kaum wanita menjadi lebih baik. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil salah, misalnya legalisasi aborsi tanpa alasan medis, maka justru kebijakan tersebut akan menggiring para wanita menuju jurang mengingat resiko aborsi sendiri dapat menyebabkan kelainan psikologis dan merusak organ reproduksi wanita.

Legalisasi aborsi dengan alasan wanita korban perkosaan yang menderita kelainan jiwa juga tidak dibenarkan karena seharusnya pihak keluarga, masyarakat dan negara dapat membantu memecahkan masalah tersebut dengan *mental recovery*. Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, legalisasi aborsi justru menimbulkan permasalahan baru.

Posisi ibu di bidang politik secara langsung yang *kebablasan* dapat menyebabkan resiko anak-anak yang terjerat kasus narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Hal ini dapat terjadi karena faktor didikan orang tua terutama ibu yang kurang baik dan maksimal. Hal ini terbukti dari beberapa kasus ibu yang menelantarkan anaknya ketika ibu tersebut meraih karir di bidang politik secara langsung.

Oleh karena itu, seorang wanita khususnya muslim dalam tataran *das sollen* itu menempatkan politik dalam koridornya dimana memang ada peranan politik langsung dan tidak langsung yang boleh dijalankan dalam islam. Peran politik langsung yang dapat dijalankan adalah sebagai anggota *majelis ummat* yang menasehati dan mengkoreksi penguasa. Sedangkan peran politik tidak langsung dapat dilakukan dengan menjadi istri, anak atau anggota partai yang memberikan nasehat dan koreksi pada suami, ayah yang menjadi penguasa atau pengambil kebijakan strategis langsung di bidang politik, misalnya: menjadi istri atau anak dari khalifah, panglima perang, wali, qadhi dan sebagainya. Hal yang perlu dicatat apabila melakukan peranan politik langsung maupun tidak langsung, jangan sampai melupakan fitrah sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya maupun istri yang baik bagi suaminya. Jadi perlu adanya keseimbangan peran publik dan domestik.

Apabila menelusuri lebih lanjut, sebenarnya di dunia ini masalah kemiskinan, ketidakadilan, ketidaksejahteraan yang menimpa wanita sebagai jumlah mayoritas di dunia adalah karena kebijakan yang berasal dari sistem politik yang tidak tepat. Politik

dengan makna usaha mencari, mempertahankan kekuasaan (politik kekuasaan) yang berdasarkan kontrak sosial ala Locke, Rousseau, Montesquieu menyebabkan pemimpin negara seperti presiden atau perdana menteri digaji berdasarkan kontrak selama periode tertentu untuk mengatur urusan masyarakat, padahal kepengurusan tersebut belum tentu beres. Sedangkan dalam islam, lebih menekankan politik pelayanan dimana khalifah tidak digaji dalam mengatur atau melayani urusan masyarakat, melainkan hanya dijamin kebutuhan pokok keluarganya berupa sandang, pangan dan papan.

Jadi ketika sekarang ini yang dominan adalah ideologi sekuler-liberal bukan masalah dunia yang lebih berpihak pada laki-laki, menyebabkan orang yang lebih memiliki banyak aset semakin memiliki posisi tawar yang kuat dalam kehidupan. Dalam politik liberal maupun neoliberal berusaha meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa melihat efek negatif lain bagi masyarakat. Ketika ideologi dan sistem yang diterapkan tidak tepat, tentu saja *output* atau hasil berupa kebijakan menjadi tidak tepat.

Buktinya apabila dibandingkan dengan sejarah zaman keemasan peradaban islam seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, kasus perceraian, aborsi, pergaulan bebas, kemiskinan, ketidakadilan, ketidaksejahteraan sangat minim bahkan hampir tidak ada, karena landasan politik adalah pelayanan masyarakat, sehingga memperhatikan urusan masyarakat baik itu pria maupun wanita, muslim maupun non muslim, dengan aturan-aturan yang berlaku umum dan khusus. Bahkan ketika seorang wanita Amuria dilecehkan tentara Romawi, Khalifah Al-Mu'tashim Billah telah *mengerahkan* pasukan yang ujungnya di Baghdad dan ekornya di Romawi, yang sangat menunjukkan penjagaan dan perlindungan umat islam terhadap para wanita. Padahal perlu dicatat bahwa dalam islam, pengambil

kebijakan strategis adalah kaum pria dengan adanya batasan peran politik bagi wanita, tetapi justru dapat membela para wanita.

Puisi dibawah ini dapat dijadikan gambaran dan renungan apa yang terjadi saat ini ketika ide gender dan feminisme berusaha disuarakan di Indonesia padahal sebenarnya ide tersebut di Barat maupun di negeri Timur lain sudah mengalami kegagalan dalam menyelesaikan masalah manusia.:

“OO..Aku Bosan! Kuingin Perubahan!”¹⁹

*Kementrian Pemberdayaan Perempuan
Dana Luar Negeri
Tema Kesetaraan Gender
Sosialisasi seluruh Instansi
Hasil 07:30, di sektor publik.
Wacana orang beriman diobrak abrik.
Kaum wanita semakin percaya melakukannya
Bahwa berkarir di luar rumah... lebih berharga
Daripada jadi “sekedar” IBU rumah tangga
Anak-anak semakin jauh dari kegenapan persusuan
Al-Qur’an dan As-Sunnah dibelakang-belakangkan*

*Orang-orang dewasa pada takut nikah beneran
Tabloid, Koran, Selebaran porno dijual di emperan-emperan
Remaja ambruk oleh syahwat.
Para orang tua masih saja terus bilang,
Anak kami selamat....
Kepala Negara manggut-manggut demi utang pinjaman,
Orang politik belum selesai juga rebutan kekuasaan,
GAWAT!
Film-film TV penuh sadisme dan pornografi
Pedophilia mengincar anak-anak, ngeri sekali
Kata-kata vulgar terus dijual, tak indahkan moral
Pusar dan tubuh gadis-gadis diobral-obral di jalan-jalan dan mal-mal
Koq para orang tuanya berpendapat:
“Mumpung badan masih sintal!”
Kalau sudah hamil, kandungan digugurkan,
Orang tua bilang: “ini cobaan”
Lalu ketika anak lelaki mereka juga menghamili,
Kedua pihak orang tua tetap memilih,
kehormatan dunia dan martabat keluarga
Jadi jabang bayi harus dimusnahkan secepatnya
Apalagi direstui pemerintah dan ilmu kedokteran pada umunya
Umur 20 minggu, 5 bulan itu!
Sudah ada ruhnyanya, sudah ditetapkan takdirnya...
Sudah lengkap dia sebagai manusia sempurna!
Naudzubillah....
Masih boleh dicacah-cacah dengan biadabnya!!!*

¹⁹ Puisi Karya Neno Warisman yang disampaikan pada Talk Show “Menunggu Kiprah Muslimah” UC UGM, 7 Oktober 2002

*Bayi-bayi suci teraniaya,
Hancur masuk ke kantong plastik hitam...
Dibuang ke tempat sampah yang hina!
Berjuta jumlahnya, jangan salah!!!
Lihatlah angka kematian remaja karena bayinya..30 persen sudah!
Lalu semua orang-orang jahat itu kembali hidup terhormat seperti sediakala
Dan saling berkata diantara mereka:
"Alloh sedang menguji kita, namun Alhamdulillah...
kita selamat dari aib di masyarakat berkat ketabahan hati kita"
Hah...!!!*

Kesimpulan

Sebuah fenomena yang sangat umum terjadi ketika umat islam saat ini baik pria dan wanita kebanyakan lebih mengenal, mengetahui, memahami sepaik terjang para artis wanita, pemimpin wanita yang berkuasa secara langsung dibandingkan peran politik apa yang telah dilakukan oleh wanita-wanita islam pada masa keemasan peradaban. Sehingga, nama-nama seperti Khadijah, Aisyah, Sumayyah, Asma' binti Abu Bakar, Asma' binti Yazid, Khaulah, Ummu Sulaym, Fathimah Az-Zahra menjadi tenggelam, kurang dikenal dan diketahui. Apabila dikenal dan diketahui terkadang karena pembacaan hadist yang dipenggal atau tidak penuh maupun melihat sebab turunnya dengan tidak tepat, menyebabkan penafsiran yang tidak tepat pula. Hal inilah yang banyak terjadi dalam kalangan yang mengaku sebagai feminis islam seperti Fatima Mernissi, Nawal El-Saadawi, Riffat Hassan, Taslima Nasreen, Assia Djebar, Amina Wadud dan sebagainya. Hal ini disebabkan pengaruh yang sangat kuat dari feminis sekuler-liberal dan marxis yang menyebabkan adanya hermeneutika feminis sebagai titik tolak dari feminis islam.²⁰ Meskipun feminis islam tidak menafikan unsur keluarga, tetapi pengaturan keluarga yang tidak tepat juga mendorong ke jurang kehancuran, misalnya melarang poligami, aturan hak waris pria dan wanita 1:1, wanita

²⁰ penjelasan secara rinci tentang gender, feminisme dan hermeneutika feminis dapat dibaca dari Syamsuddin Arif, *Menyikapi Feminisme dan Isu Gender* dan Adian Husaini, *Hermeneutika Feminis: Suatu Kajian Kritis* dalam Jurnal Al-Insan No.3, Vol. 2, 2006, hlm. 90 - 113

dapat menjadi imam sholat. Padahal aturan islam perlu dipandang secara komprehensif bukan secara parsial. Sebagai contoh: hak waris pria yang lebih banyak disebabkan pria lebih memiliki banyak tanggungan keluarga untuk dinafkahi. Wanita tidak wajib menafkahi siapapun dan berhak menggunakan hak warisnya untuk keperluannya sendiri. Bukankan makna adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, bukan masalah porsi yang sama. Meskipun aturan islam ini sekarang susah dan jarang diterapkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu sudah seyogyanya bagi umat islam khususnya untuk lebih mengenal ajarannya sendiri, pepatah mengatakan bahwa *tak kenal maka tak sayang*. Islam sudah memposisikan wanita dalam posisi politik secara langsung maupun tidak langsung dalam fitrahnya sebagai hamba dari sang Pencipta dan anggota masyarakat dalam rangka kerhamonisan kehidupan dengan aturan-aturan khusus, bukan karena menomorduakan para wanita.

Daftar Pustaka

- Adams, Ian. Ab. Ali Noerzaman, *Ideologi Politik Mutakhir*, Yogyakarta: Qalam, Juli 2004
- Abdurrahman, Hafidz, *Islam: Politik dan Spiritual*, Jakarta: Wadi Press, t.t.
- Bahan Training Solidaritas Perempuan Indonesia t.t. t.p.
- Fakih, Mansour, *Manual Pendidikan Politik bagi Perempuan*. t.t. t.p.
- Ghani, Soelistiyati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Muslikhati, Siti *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Patel, Ismail Adam, *Perempuan, Feminisme dan Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, September 2005
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Sa'idah, Najmah dan Khusnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003

Zallum, Abdul Qadim, *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2004

Jurnal Al-Insan No.3, Vol. 2, 2006

Jurnal el-Harakah No.56 / XXII/ Januari –Maret 2001

Journal of International Women's Studies Vol. 7 #2 November 2005

Makalah Talk Show "*Menunggu Kiprah Muslimah*" UC UGM, 7 Oktober 2002

[http:// www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). pada 15 April 2007

Biodata Penulis

Ita Mutiara Dewi, S.I.P. Staf Pengajar Program Studi Ilmu Sejarah di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan program S-1 Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM pada tahun 2003. Sedang menempuh studi di program Pasca Sarjana S-2 Ilmu Politik konsentrasi Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM. Mata kuliah yang diampu saat ini adalah: Dasar-dasar Ilmu Politik, Ilmu Politik dan Sejarah Politik dan Hubungan Internasional.